



Pembayaran BPJS Lebih dan Perjalanan Dinas Ganda



MUHLIS MAJID/FAJAR

SERAHKAN LHP. Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2024 kepada Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto didampingi Ketua DPRD Makassar, Supratman di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Kamis, 9 Januari.

Pembayaran BPJS Lebih dan Perjalanan Dinas Ganda

Temuan BPK Sulsel

MAKASSAR, FAJAR — Sejumlah catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 ke Provinsi Sulsel dan tujuh kabupaten/kota. Ini menunjukkan bahwa seluruh daerah menerima rekomendasi tambahan untuk dilakukan perbaikan. Beberapa temuan yang disorot antara lain pembayaran BPJS yang

Baca Pembayaran... Hlm 11

REKOMENDASI BPK SULSEL

Pemprov Sulsel 1.914

- 1.894 sebelumnya
- 20 tambahan

Makassar 1.887

- 1.845 sebelumnya
- 42 tambahan

Gowa 1.201

- 1.171 sebelumnya
- 30 tambahan

Maros 1.434

- 1.402 sebelumnya
- 32 tambahan

Pangkep 942

- 899 sebelumnya
- 43 tambahan

Enrekang

1.134 rekomendasi

- 1.078 sebelumnya
- 56 tambahan

Tana Toraja 1.310

- 1.281 sebelumnya
- 29 tambahan

Luwu Timur 893

- 877 sebelumnya
- 16 tambahan

INFOGRAFIS: ANS/FAJAR

Pembayaran BPJS Lebih dan Perjalanan Dinas Ganda

❖ Lanjutan Halaman... 9

lebih dan pengajuan surat perjalanan dinas yang ganda.

Penambahan rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan perbaikan tata kelola yang lebih efektif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dipaparkan hingga Semester II 2024, Provinsi Sulsel mendapatkan rekomendasi terbanyak, yaitu 1.914, yang terdiri dari 1.894 rekomendasi sebelumnya dan 20 rekomendasi tambahan.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, Makassar tercatat memiliki jumlah rekomendasi terbanyak, yaitu 1.887, yang terdiri dari 1.845 rekomendasi sebelumnya dan 42 rekomendasi tambahan. Diikuti Kabupaten Maros dengan total 1.434 rekomendasi, yang terdiri dari 1.402 rekomendasi sebelumnya dan

32 rekomendasi tambahan (lengkap grafis).

Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun menegaskan, penambahan ini bertujuan agar setiap daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pelayanan publik. "Kami berharap dengan langkah ini, kualitas pengelolaan keuangan di Sulawesi Selatan bisa lebih baik lagi," ujarnya.

BPK juga terus memantau progres implementasi rekomendasi di masing-masing daerah. Hal tersebut untuk memastikan adanya perbaikan signifikan yang berdampak positif bagi masyarakat. Beberapa catatan yang dia sampaikan adalah masih adanya temuan seperti pembayaran BPJS yang lebih dan surat perjalanan dinas yang ganda. Termasuk beberapa temuan yang disebut telah beru-

lang-ulang. Dia meminta untuk semua itu dilakukan perbaikan dan sesuai aturannya selama 60 hari.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengatakan rekomendasi-rekomendasi BPK ini sangat membantu Pemkot Makassar. Khususnya untuk kemampuan transparansi. Dia akui soal rekomendasi terkait kelebihan BPJS dan menyangkut barang dan jasa (Barjas). "Sehingga dengan pemeriksaan ini lebih jelas lagi yang mana salah, yang mana tidak boleh dan yang mana diperkuat inilah gunanya ada pemeriksaan seperti itu," katanya.

Dia pun akan segera menyelesaikan seluruh rekomendasi-rekomendasi tersebut. Harapannya selesai sebelum jabatannya berakhir. Apalagi kata dia, tidak ada masalah yang terlalu krusial, seperti surat perjalanan dinas ganda,

menurutnya, itu tidak ada di Makassar.

"Kalau di kota nda seperti itu, itukan yang lain-lain (kabupaten kota lain). Kalau di kota kalau seperti itu, kita sudah dengan sistem smart city yang cukup kuat tidak ada lagi. Dahulu ada, tapi sekarang tidak lagi," tegasnya kepada media usai menerima LHP di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Kamis, 9 Januari.

Termasuk soal anggaran, Danny menyebut, Makassar tidak ada persoalan dan semua program sudah ada anggarannya. "Alhamdulillah akhir masa jabatan saya tidak ada utang kita. Kemudian kami tidak pernah berani membuat sesuatu tanpa anggaran," paparnya. Adapun tujuh kabupaten kota yang menerima LHP yaitu Makassar, Gowa, Maros, Luwu Timur, Enrekang, Pangkep, dan Tana Toraja. **(mum/ham)**